



JURNAL TEKNIK SIPIL LATERAL
PRODI TEKNIK SIPIL UNIVERSITAS TRIDINANTI

**EVALUASI KELAYAKAN DAN KESIAPAN HUNIAN PADA
RUMAH SUSUN KEJAKSAAN TINGGI
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Dian Sefriansyah^{1)*}, Kiagus Muhammad Aminuddin²⁾, Arie Putra Usman²⁾

¹⁾Mahasiswa Program Studi Program Profesi Insinyur (PSPPI), Fakultas Teknik, Universitas Sriwijaya, Indonesia

²⁾Program Studi Program Profesi Insinyur (PSPPI) Fakultas Teknik, Universitas Sriwijaya, Indonesia

*Corresponding Author, Email : diansefriansyah80@gmail.com.

Artikel Info	ABSTRAK
Diterima : 17 Mei 2026 Disetujui : 11 Juli 2026 Diterbitkan : 15 Juli 2026	Pemerintah memiliki kewajiban menyediakan rumah susun bagi masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), aparatur sipil negara (ASN), serta kelompok rentan lainnya. Tantangan koordinasi antar pemangku kepentingan menjadi fokus penting untuk mewujudkan hunian vertikal yang layak, efisien, dan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan agar Rumah susun yang di bangun pada kejaksaa tinggi mendapat nilai layak huni dan bisa segera ter huni ,Penelitian ini dilakukan di Kejaksaan Tinggi Provinsi Sumatera Selatan. Penelitian ini untuk menilai kelayakan dan kesiapsiagaan perumahan di rumah susun Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR Nomor 07 Tahun 2022 tentang pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan perumahan khusus yang disediakan pemerintah. Hasil evaluasi penilaian kelayakan perumahan rumah susun kejaksaa tinggi provinsi Sumatera Selatan menghasilkan skor 78,50 (Baik). Berdasarkan evaluasi tersebut, perbaikan diperlukan untuk kelayakan perumahan, khususnya perbaikan kusen, pintu, jendela, dinding, plafon, jalan akses, sistem air, dan sistem pembuangan limbah.
Kata Kunci	ABSTRACT
Rumah susun, Layak huni, Kelayakan, Kesiapsiagaan <i>Keywords: Flats, Habitability, Eligibility, Preparedness</i>	The government has an obligation to provide apartment housing for the public, particularly for low-income communities (MBR), civil servants (ASN), and other vulnerable groups. Coordination challenges among stakeholders have become a key focus in realizing livable, efficient, and sustainable vertical housing. This study aims to ensure that the apartment building constructed at the High Prosecutor's Office is deemed habitable and can be occupied immediately. The research was conducted at the High Prosecutor's Office of South Sumatra Province. The objective is to assess the feasibility and readiness of the apartment housing at the South Sumatra High Prosecutor's Office, in accordance with the Regulation of the Minister of Public Works and Housing (PUPR) Number 07 of 2022 concerning the implementation of Housing Development Assistance and special housing provided by the government. The evaluation results of the housing feasibility assessment at the South Sumatra High Prosecutor's Office produced a score of 78.50 (Good). Based on this evaluation, improvements are necessary to meet housing feasibility standards, particularly in the areas of window and door frames, doors, windows, walls, ceilings, access roads, water systems, and waste disposal systems.

PENDAHULUAN

Pemerintah berkewajiban membangun rumah susun umum, khusus, dan negara sesuai UU Nomor 20 Tahun 2011. Sebagaimana tertuang dalam UU Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pemerintah merupakan kewenangan utama yang diberikan kekuasaan di Negara Republik Indonesia. Pembangunan apartemen merupakan upaya untuk mengurangi perluasan permukiman kumuh dan permukiman informal serta meningkatkan efisiensi tata guna lahan dan tata ruang. Dalam rangka mewujudkan tujuan terciptanya apartemen yang sehat, aman, harmonis, dan ramah lingkungan, Ditjen Perumahan yang merupakan bagian dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengawasi program bantuan pembangunan rumah susun. Apartemen umum, khusus, dan didanai negara, serta jenis perumahan lainnya, disubsidi oleh pemerintah federal melalui anggaran negara. Strategi yang diterapkan oleh Direktorat Rumah Susun sejalan dengan arah kebijakan adalah sebagai berikut:

1. Kompleks perumahan ini terutama melayani masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan aparatur Sipil Negara (ASN), sekaligus mendukung kegiatan pendidikan dan keagamaan.
2. Pengembangan unit hunian di kawasan metropolitan, urban, dan *transit oriented development* (TOD); pembangunan apartemen untuk menunjang Ibu Kota Negara (IN), Kawasan Strategis Pembangunan Nasional (KSPN), Kawasan Industri (KI), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan kawasan pertumbuhan ekonomi lainnya;
3. Pembangunan hunian baru yang komprehensif melalui penyediaan unit; Pengawasan dan administrasi apartemen;
4. Pemanfaatan teknologi berkelanjutan dan bahan bangunan.

Kelompok penerima dialokasikan untuk kementerian, lembaga, pemerintah daerah, universitas, lembaga pendidikan agama asrama, dan yayasan, dan terlibat dalam upaya sosial, kemanusiaan, atau pendidikan. Penerima pembangunan perumahan rakyat. dialokasikan ke MBR untuk memenuhi persyaratan perumahan umum. Penerima manfaat pembangunan rumah susun negara antara lain pejabat, aparatur sipil negara, personel Tentara Nasional Indonesia, dan POLRI. Penerima manfaat dari pengembangan apartemen hunian terutama ditargetkan untuk:

- a. Pekerja industri adalah mereka yang

- bekerja sebagai buruh di kawasan industri;
- b. Penduduk daerah perbatasan; dan komunitas nelayan terdiri dari mereka yang mendiami wilayah pesisir yang mencari nafkah dari penangkapan ikan.
- c. Komunitas Korban Bencana terdiri dari individu-individu yang terkena dampak langsung dari bencana yang memiliki signifikansi nasional;
- d. Masyarakat yang terkena dampak inisiatif pembangunan pemerintah pusat terdiri dari individu-individu yang terpaksa mengosongkan tempat tinggal aslinya karena dampak dari program-program tersebut; Populasi yang tinggal di lokasi yang tersebar di pulau-pulau terluar, daerah terpencil, dan daerah tertinggal;
- e. Kelompok yang membutuhkan bantuan khusus antara lain tenaga kesehatan, lansia, penerima manfaat Layanan Kesejahteraan Sosial (PPK), individu miskin, penyandang disabilitas, yatim piatu, dan anak terlantar yang membutuhkan dukungan sosial.;
- f. Pelajar;
 - a. komunitas berprestasi;
 - b. dan/atau peserta olahraga.
 - c. Pengembangan unit hunian melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan pembangunan, pengelolaan dan hunian, pengalihan aset, dan manajemen risiko sesuai dengan persyaratan hukum.
 - d. Pembangunan apartemen menggunakan teknologi canggih, termasuk Building Information Modeling (BIM)

Pada Studi pembangunan Rumah Susun Khusus MBR di Bekasi (Sentra Terpadu Pangudi Luhur Bekasi) adalah sebuah rumah susun (rusun) yang dibangun oleh Kementerian Sosial dan diresmikan pada 10 Februari 2023, khusus diperuntukkan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), terutama eks gelandangan dan pengemis yang dibina oleh Kementerian Sosial. Rusun setinggi lima lantai ini memiliki 93 unit tipe 24 dan biaya sewanya sangat terjangkau, yaitu hanya sekitar Rp10 ribu per bulan. Untuk Informasi Tambahan: Pembangunan Dibangun oleh Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Jawa Barat, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Jawa II, dari Direktorat Jenderal Perumahan. Adapun Tujuannya yaitu Memberikan hunian layak dan terjangkau bagi MBR yang membutuhkan, khususnya mantan

gelandangan dan pengemis.

Inisiatif untuk menyediakan perumahan yang layak dan murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Indonesia melalui pembangunan flat menemui hambatan, sehingga memerlukan koordinasi antara pemerintah pusat, pemasok, penerima manfaat, dan pengelola untuk mewujudkan hasil yang menguntungkan (Primordia, dkk 2023). Kolaborasi antar pemangku kepentingan memerlukan pendelegasian kekuasaan di setiap fase dan arahan untuk pelaksanaan dukungan dan administrasi apartemen. Untuk mencapai implementasi tepat waktu dari apartemen berkualitas tinggi dengan biaya yang sesuai, dengan administrasi yang efisien, dan untuk menjadi acuan pelaksanaan pendampingan dalam pembangunan apartemen.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data

Data primer yang disajikan dalam penelitian ini berkaitan dengan kondisi rumah susun Kejati saat ini di provinsi Sumatera Selatan. Ini selanjutnya menggunakan data sekunder, yaitu instrumen untuk menilai kelayakan hunian.

Metode Pengumpulan Data

Metodologi pengumpulan data meliputi pemanfaatan observasi. Observasi memerlukan pendokumentasian secara menyeluruh terhadap gejala-gejala yang ditunjukkan oleh topik penyidikan (Sugiyono, 2012: 142).

Pemeriksaan Data

Kami menggunakan pendekatan analisis data kuantitatif. Metode ini memungkinkan kita untuk memeriksa dimensi dan memastikan rasio nilai terhadap berat benda yang dievaluasi. Dalam ranah outcome penilaian kinerja, terdapat instrumen penilaian yang harus dipenuhi. Sejalan dengan DJP SE No. 12 tahun 2022 tentang Pedoman Teknis pelaksanaan pendampingan pembangunan dan pengelolaan rumah susun, Berikut disampaikan tabel instrumen yang digunakan Balai sebagai Tim pelaksana penilaian kelayakan Hunian Pada Rumah susun Kejaksanaan Tinggi Provinsi Sumatera Selatan.

Pada Gambar 1 menjelaskan instrumen penilaian tentang evaluasi kinerja Bangunan Rumah susun yang berbobot 60% dengan penilaian dari segi struktur bangunan, arsitektur bangunan dan kelengkapan dokumen pada Bangunan Rumah susun kejaksanaan tinggi provinsi Sumatera Selatan.

VARIABEL	SUB VARIABEL	KRITERIA PENILAIAN	NILAI	KETERANGAN
EVALUASI KINERJA BANGUNAN RUMAH SUSUN (60%)			0,00	
A	KEBERSIHAN (10%)	A1 Dalam Bangunan		
		A2 Luar Bangunan		
B	KERAPAHAN	B1 Kusen, Pintu Jendela		
		B2 Dinding		
		B3 Lantai		
		B4 Plafond		
		B5 Atap		
		B6 Kamar Mandi		
		B7 Pintu Shaft		
		B8 Meubelair		
C	DOKUMEN (10%)	C1 Administrasi		
		C2 Pemeliharaan		

Gambar 1. Tabel instrumen

EVALUASI FUNGSI PENUNJANG BANGUNAN RUMAH SUSUN (40%)					0,00	
D	PRASARANA (10%)	D1 GWT				
		D2 Septictank				
	SARANA (5%)	D3 Jalan akses / paving block				
		D4 Area Parkir				
	UTILITAS (25%)	D5 Listrik/ Penerangan				
		D6 Air				
		D7 Saluran keliling bangunan				
TOTAL					0,00	0,00

Gambar 2. instrumen penilaian evaluasi fungsi penunjang

Pada Gambar 2 menjelaskan instrumen penilaian evaluasi fungsi penunjang Bangunan Rumah susun dengan bobot 40% dengan penilaian dari segi Prasarana, Sarana dan Utilitas pada Bangunan Rumah susun kejaksanaan tinggi provinsi Sumatera Selatan. Dari 2 evaluasi penilaian tersebut maka dapat dikategorikan hasil penilaian kinerja pada bangunan rumah susun kejaksanaan tinggi provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut:

KATEGORI HASIL PENILAIAN KINERJA		
90-100	MEMUASKAN	A
80-89	BAIK	B+
70-79	CUKUP	B
60-69	KURANG BAIK	C

Catatan:

A dan B+	dapat diresmikan
B	dapat direkomendasikan dengan perbaikan terlebih dahulu
C	tidak direkomendasikan untuk diresmikan

Gambar 3. Kategori hasil penilaian kinerja pada bangunan rumah susun

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut UU Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun dan Peraturan Menteri PUPR No. 07 tahun 2022 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan penyediaan Rumah Khusus oleh Pemerintah dan SE DJP No. 12 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis

Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan dan Pengelolaan Rumah Susun, sebelum diadakan proses serah terima aset maka harus dilakukan proses evaluasi penilaian kinerja Bangunan rumah susun dan fungsi penunjang rumah susun. Menurut Ilahi, dkk (2023), satu-satunya pilihan untuk menjembatani kesenjangan antara perencanaan dan aktualisasi adalah melalui evaluasi. Biasanya, dalam hal membangun sebuah perusahaan, baik itu perusahaan teknik atau non-teknik, pelaksanaan kegiatan pembangunan apartemen tidak selalu berjalan sesuai rencana dari segi anggaran, ketepatan waktu, dan standar kualitas. Melalui wawancara dengan tim pengawas dari Kementerian PUPR, seluruh data yang berkaitan dengan proses pembangunan infrastruktur rumah susun bertingkat di provinsi Sumatera Selatan dievaluasi dari segi kualitas kerja. Mengenai evaluasi visual pembangunan gedung apartemen bertingkat tinggi di provinsi Sumatera Selatan, tim penilai dari unit pelaksana yaitu Balai Evaluasi Pelaksanaan Perumahan Sumatera V mengembangkan alat berikut untuk mengukur okupansi bangunan tersebut:

Pada Penilaian Evaluasi Kinerja Bangunan Rumah susun dengan Bobot nilai 60% (Tabel 1), ada beberapa variabel yang harus dipenuhi yaitu Kebersihan dengan bobot nilai 10 %, yang harus dinilai meliputi kebersihan dalam bangunan mendapat nilai baik (5%) dan Kebersihan luar bangunan mendapat nilai baik (5%) ,pada variabel Kerapihan dengan Bobot 40% , yang harus dinilai meliputi Kerapihan Kusen, Pintu jendela mendapat nilai butuh perbaikan (2,5%) dikarenakan Sealant kusen pintu pada hunian lantai 5 sebagian lepas.



Gambar 4. Keadaan kerapian jendela

Finishing plesteran jendela hunian lantai 3 tidak rapi Solusi yang diberikan dilakukan perapihan plesteran serta Dilakukan penambahan sealant agar rapi dan kokoh, Pada sub variabel penilaian Kerapihan dinding mendapat nilai butuh perbaikan (2,5%)



Gambar 5. Keadaan kerapian pintu dan kusen



Gambar 6. Keadaan kerapian kanopi

Kanopi roster melendut dan permukaan tidak rata Solusi yang dapat diberikan Dilakukan perapihan dan pengecekan strukturnya. Ketebalan disesuaikan perencanaan pada sub variabel Kerapihan Lantai mendapat nilai Baik (5%) , pada sub Variabel Kerapihan Plafond mendapat nilai butuh perbaikan (2,5%)



Gambar 7. Finishing plafon kamar

Finishing dinding dan list plafon kamar mandi hunian lantai 4 belum rapi Solusi yang diberikan yaitu dilakukan perapihan pada plafond. Pada Sub Variabel Kerapihan atap mendapat nilai baik (5%) ,sub variabel kerapihan Kamar mandi mendapat nilai baik (5%) ,pada sub variabel kerapihan pintu shaft mendapat nilai

Butuh perbaikan (2,5%).



Gambar 8. Finishing pintu shaft



Gambar 8. Finishing handle pintu shaft

Jalusi pintu shaft belum terpasang kokoh pada beberapa unit di lantai 2, 3, dan 4. Handle pintu shaft tidak mengunci Solusi yang diberikan yaitu Dilakukan perbaikan pemasangan jalusi dan penyetelan ulang handle pintu. pada sub variabel kerapihan Meubelair mendapat nilai Baik (5%), dan pada variabel Dokumen dengan bobot nilai 10% dengan sub variabel Administrasi dengan nilai (2,5%) dikarenakan yang baru kita dapatkan dokumen nya hanya Perijinan Bangunan Gedung (PBG) dan Daftar Calon Penghuni sedangkan Study Kelayakan dan surat ijin permohonan penghunian sementara masih dalam proses, dan sub variabel Pemeliharaan dengan nilai (5%). Berikut data tabel hasil evaluasi penilaian secara Visual pada Pembangunan rumah Susun kejaksanaan tinggi provinsi Sumatera Selatan.

Pada Evaluasi penilaian Fungsi Penunjang Kinerja Rumah susun (Tabel 2) variabel yang dinilai adalah Prasarana yang bobot nilainya adalah 10% dengan sub variabel Ground Water Tank (GWT) dinilai Baik (5%) dan sub variabel Septitank dinilai Baik (5%). Pada Variabel Sarana yang Bobot nilainya 5% dengan sub variabel jalan akses/Paving Block dinilai perlu perbaikan (1,5%).

Tabel 1. Evaluasi Kinerja Bangunan Rumah Susun (60%)

Variabel		Sub Variabel		Kriteria Penilaian			Nilai			
A	Kebersihan (10%)	A1	Dalam Bangunan	a	Bersih	5,00	5,00			
				b	Sebagian bersih	2,50				
				c	Tidak bersih	0,00				
		A2	Luar Bangunan	a	Bersih	5,00	5,00			
				b	Sebagian bersih	2,50				
				c	Tidak bersih	0,00				
B	Kerapihan (40%)	B1	Kusen, Pintu, Jendela	a	Pemasangan seluruhnya presisi, tegak lurus, sambungan antar pintu jendela dengan dinding ditutup sealant dengan rapi	5,00	2,50			
				b	Pemasangan sebagian presisi, tegak lurus, sambungan antar pintu jendela dengan dinding ditutup sealant dengan rapi	2,50				
				c	Pemasangan sebagian besar kurang presisi, tegak lurus, sambungan antar pintu jendela dengan dinding ditutup sealant dengan rapi	0,00				
				B2	Dinding	a		Seluruh plesteran rata, hasil pengecatan solid	5,00	2,50
						b		Sebagian besar plesteran rata, hasil pengecatan kurang solid	2,50	
						c		Sebagian besar plesteran tidak rata, hasil pengecatan tidak solid	0,00	
		B3	Lantai	a	Seluruh permukaan rata, pemasangan ubin presisi, nat lantai rapi	5,00	5,00			
				b	Sebagian besar permukaan rata, pemasangan ubin presisi, nat lantai rapi	2,50				
				c	Sebagian besar permukaan tidak rata, pemasangan ubin tidak presisi, nat lantai tidak rapi	0,00				

B4	Plafond	a	Permukaan rata dan kondisi sambungan rapat	5,00	2,50
		b	Sebagian permukaan rata dan kondisi sambungan rapat	2,50	
		c	Permukaan tidak rata dan kondisi sambungan tidak rapat	0,00	

Tabel 2. Evaluasi Fungsi Penunjang Bangunan Rumah Susun (60%)

Variabel	Sub Variabel		Kriteria Penilaian		Nilai	
A Prasarana (10%)	1	GWT	a	Berfungsi dan tidak bocor	5,00	5,00
			b	Tidak berfungsi dan bocor	0,00	
	2	Septik tank	a	Berfungsi	5,00	5,00
			b	Tidak berfungsi	0,00	
B Sarana (5%)	3	Jalan akses/paving block	a	Paving tidak amblas, rata permukaan dan kualitas paving memenuhi kekuatan	3,00	1,50
			b	Paving tidak amblas, sebagian/di beberapa tempat tidak rata dan kualitas masih memenuhi kekuatan	1,50	
			c	Tidak ada	0,00	
	4	Area parkir	a	Ada dan memenuhi spesifikasi, diprioritaskan bagi kendaraan bermotor dengan skala perbandingan	2,00	2,00
			b	Tidak ada	0,00	
			c	Tidak ada	0,00	
C Utilitas (25%)	5	Listrik/penerangan	a	Tersambung dengan daya yang cukup dan sesuai dengan penggunaannya (curah/token)	10,00	10,00
			b	Tidak ada	0	
	6	Air	a	Tersedia dengan kualitas memenuhi syarat laboratorium, jernih tidak bau dan tidak mengandung mangan dan ferro	10,00	5,00
			b	Tersedia, kualitas belum memenuhi syarat laboratorium jernih, tidak bau dan tidak mengandung mangan dan ferro	5,00	
			c	Tidak ada	0	
	7	Saluran keliling bangunan	a	Kuat, lancar dan memiliki kemiringan serta terhubung dengan drainase eksisting	5,00	2,50
			b	Ada tetapi tidak lancar dan tidak memiliki kemiringan serta tidak terhubung dengan drainase eksisting	2,50	
			c	Tidak ada	0	



Pertemuan cor beton dengan pohon belum rapi pada area landscape Solusi yang diberikan yaitu Perlu dilakukan perapihan. Pertimbangan menggunakan *tree grate*, dan pada Sub variabel area parkir mendapat nilai Baik (2%). Pada variabel Utilitas dengan bobot nilai 25% dengan sub variabel Listrik/penerangan dinilai baik (10%), pada sub variabel Air dinilai masih perlu

perbaikan (5%) dikarenakan kualitas air belum memenuhi syarat laboratorium, pada sub variabel saluran drainase dinilai masih perlu perbaikan (2,5%) dikarenakan tidak terhubung ke drainase eksisting. Berikut gambar tabel penilaian Fungsi Penunjang Bangunan Rumah susun :

Maka Solusi yang dapat kita ambil yaitu mendiskusikan kelayakan bangunan Gedung Rumah susun pada pengawas lapangan dan pihak dari kontraktor agar segera melakukan perbaikan pada Kusén, Pintu jendela, dinding, plafond, jalan akses, air dan saluran pembuangan. Karena syarat untuk dapat dibuatkan Berita acara inventaris (BAI) poin yang harus dicapai yaitu 80,00 dan kita baru bisa mengundang Tim dari direktorat Jendral Perumahan subdit Barang Milik Negara (BMN) agar bisa membikin Berita Acara Inventaris (BAI) dan segera di dibuatkan Berita Acara Serah Terima Aset Kepada Penerima Bantuan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap kelayakan dan kesiapan hunian pada Rumah Susun Kejaksaan Tinggi Provinsi Sumatera Selatan, dapat disimpulkan bahwa:

- Kelayakan Bangunan: Secara fisik, struktur bangunan rusun dinyatakan layak huni dengan kondisi konstruksi yang memenuhi standar teknis dan keamanan. Tidak ditemukan kerusakan mayor yang membahayakan penghuni.
- Kesiapan Fasilitas Penunjang: Fasilitas penting, termasuk listrik, air minum, sanitasi, dan sistem drainase, dapat diakses dan beroperasi dengan baik. Namun, terdapat beberapa catatan pada area ruang terbuka hijau dan fasilitas umum yang masih perlu ditingkatkan.
- Aspek Legal dan Kepemilikan: Status kepemilikan dan pengelolaan telah sesuai dengan peraturan, namun diperlukan sosialisasi lebih lanjut kepada calon penghuni terkait hak dan kewajiban.
- Aspek Sosial dan Kesiapan Penghuni: Calon penghuni (pegawai dan keluarga dari Kejaksaan Tinggi) menunjukkan antusiasme tinggi terhadap pemanfaatan rusun. Dukungan terhadap pola hidup komunal dan tata tertib penghuni juga sudah mulai dibangun.
- Manajemen dan Pengelolaan: Sistem pengelolaan rusun, termasuk tata kelola, keamanan, dan kebersihan, sudah disiapkan namun masih perlu penguatan SDM pengelola dan penyesuaian SOP operasional.

Rekomendasi Umum

Agar Rumah Susun dapat segera difungsikan secara optimal, disarankan:

- Melakukan penyempurnaan fasilitas pendukung.
- Menyusun rencana operasional dan pengelolaan jangka panjang.
- Mengadakan pelatihan dan sosialisasi kepada penghuni dan pengelola.
- Menyusun mekanisme pemeliharaan berkala.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2020). *Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Perumahan dan Kawasan Permukiman*. Jakarta: Kementerian PUPR.

Peraturan Menteri PUPR No. 07 tahun 2022 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan penyediaan Rumah Khusus oleh Pemerintah

SE DJP No. 12 tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan dan Pengelolaan Rumah Susun Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2018).

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Widhana, D. (2021). Kajian ruang pada hunian vertikal (Rusunawa). *Jurnal Teknik Sipil-Arsitektur*, Vol. 20 No. 1, Mei 2021.

Arumsari, P., Alisjahbana, S. W., Rarasati, A. D., & Sulistio, H. (2024). IDENTIFIKASI KARAKTERISTIK PERUMAHAN RAKYAT MELALUI ANALISIS TRIANGULASI. *JMTS: Jurnal Mitra Teknik Sipil*, 807-818.

Indrajaya, R., & Anggraini, D. (2021). Perancangan Rusunawa Sebagai Hunian Sehat Dan Berkelanjutan Bagi Mbr Di Kapuk, Jakarta Barat. *Jurnal Sains, Teknologi, Urban, Perancangan, Arsitektur (Stupa)*, 3(2), 1295-1308.

Ilahi, D. S. K., Muhammad, B., Putri, I. D. I. S., al Fausi, S., Bukhori, M. I., & Muttaqien, M. H. F. (2025). Aktualisasi Materi dan Refleksi Pembelajaran dalam Pra Amaliyah Tadris: Studi Penguatan Kompetensi Pedagogik Mahasiswa Pascasarjana Pendidikan Agama Islam. *Kartika: Jurnal Studi Keislaman*, 5(3), 2386-2396.

Primordia, Y. P., Astasy, N., Ikhwan, S. N., Shafira, D. A., Sari, S. O., & Firda, A. F. (2023, May). Program Prioritas BPS Dalam Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Kemasrindo, Kertapati Kota Palembang. In *Forum Mekanika* (Vol. 12, No. 1, pp. 9-18).